



PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 22/DPRD/2022

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah memuat daftar urutan prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. bahwa agar pembentukan peraturan daerah dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah, diperlukan perencanaan program pembentukan peraturan daerah; bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf b di atas, disusun dengan
  - c. mempertimbangkan jumlah dan bobot serta meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyusunan peraturan daerah yang dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).  
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);  
Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 100).
6. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 180/3291/RO-KUM tanggal 8 September 2022 perihal : Daftar Usulan Program Pembentukan PERDA Tahun 2023;
7. Surat Badan Pembentukan PERDA DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 13/BAPEMPERDA/XI/2022 tanggal 10 November 2022 Hal : Propemperda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023;

Memperhatikan :

1. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 180/3291/RO-KUM tanggal 8 September 2022 perihal : Daftar Usulan Program Pembentukan PERDA Tahun 2023;
2. Surat Badan Pembentukan PERDA DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 13/BAPEMPERDA/XI/2022 tanggal 10 November 2022 Hal : Propemperda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023;

-3-

Hasil Musyawarah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat ke- 51 Masa Persidangan I Tahun 2022 Tanggal 17 November 2022.

3.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 sebanyak 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Daerah;
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:  
1. 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan Usul Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
2. 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah yang Merupakan Usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah di maksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pembiayaan untuk menunjang pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 17 November 2022

WAKIL KETUA DPRD  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,  
  
PRABASA ANANTATUR



Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023  
Nomor : 22/DPRD/2022  
Tanggal : 17 November 2022

**RAPERDA USULAN INISIATIF DPRD**

No	Judul Raperda	Status		Pengusul	Keterangan
		Baru	Perubahan		
1	2	3	4	5	6
1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren	<b>Baru</b>	-	Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Usulan Lanjutan
2.	Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Barat	<b>Baru</b>	-	Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Usulan Baru

### RAPERDA USULAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Judul Raperda	Status		Pengusul	Keterangan
		Baru	Perubahan		
1	2	3	4	5	
1.	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalbar Tahun 2023-2043	<b>Baru</b>		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar	Usulan Baru
2.	Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kalbar	<b>Baru</b>		Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar	Usulan Baru
3.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah		<b>Perubahan</b>	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat	Usulan Perubahan
4.	Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	<b>Baru</b>		Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalbar	Kumulatif Terbuka

5.	Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Baru		Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalbar	Kumulatif Terbuka
----	---	------	--	--	-------------------

6.	Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Baru		Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalbar	Kumulatif Terbuka
7.	Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Kalimantan Barat	Baru		Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	Usulan Baru
8.	Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		Perubahan	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat	Usulan Perubahan
9.	Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan		Perubahan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat	Usulan Perubahan

WAKIL KETUA DPRD  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,  
  
PRABASA ANANTATUR

